



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



LAPORAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat Jalan Pahlawan No.1 RT.34

Gedung MPP Samarinda 75123,

Telp. (0541) 739614, Fax (0541) 741286, SMS Center 082152246964

Website : dpmptsp.samarindakota.go.id/mpp.samarindakota.go.id

Email: dpmptsp@samari

magnificent
SAARINDA





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Secara umum DPMPTSP telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Publik. Pada tahun 2021 telah dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan penanamn Modal dan pelayanan perizinan pada DPMPTSP.

Laporan Kinerja DPMPTSP merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP kepada publik yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan DPMPTSP dalam melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya, serta pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2021 yang didasari oleh Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2016-2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda. Selain media pertanggungjawaban Kinerja kepada publik, Laporan Kinerja ini



merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja DPMPTSP yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan Kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

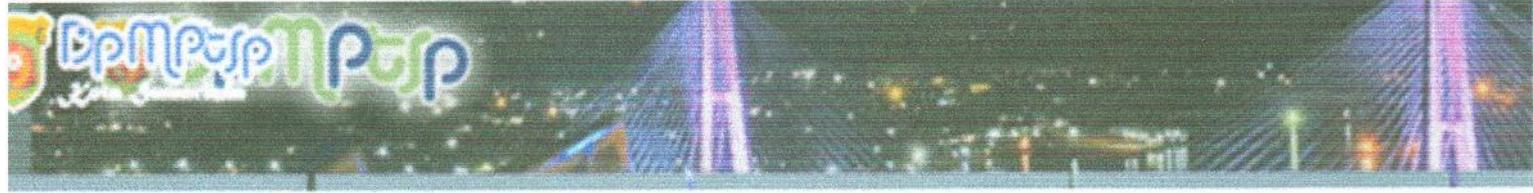
Dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja DPMPTSP secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa kinerja yang dicapai dari 6 (enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 24 (duapuluh empat) Sub Kegiatan, telah dilaksanakan dengan baik. Pada Tahun 2021 berdasarkan RENSTRA DPMPTSP ditetapkan 2 sasaran strategis dan indikator kinerja yang harus dicapai. Rata-rata capaian Kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 menunjukkan angka keberhasilan sebagai berikut :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Pro-sentase | Tingkat Capaian Sasaran | | |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | B | C | K |
| 1. | Meningkatnya Investasi | nilai investasi | Rp. 950.000.000.000,- | Rp. 1.766.235.000.000,- Terdiri dari Nilai Investasi : PMDN : Rp. 585.533.300.000,- PMA : Rp. 1.180.701.700.000,- | 78,16 % | | v | |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 92 | 88,7 | 96% | v | | |

Dari table hasil pengukuran kinerja DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021, secara umum menunjukkan hasil dengan katagori “BAIK”. dengan capaian rata-rata dari masing-masing target indikator kinerja sasaran sebesar 87.08 %.

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tidak lepas dari kerja keras semua Aparatur DPMPTSP Kota Samarinda, harmonisasi antar Bidang dan sinkronisasi fakta dan data. Guna menghadapi hambatan dalam pencapaian target indikator kinerja untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sesuai Rencana Strategi DPMPTSP, dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan sebagai berikut :

1. melakukan inovasi dan perbaikan dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Samarinda dan terus melanjutkan inovasi dan perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Samarinda sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021.
2. Melakukan kegiatan Konsultasi/Pendampingan kepada Investor untuk melaporkan kegiatan investasi.



3. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Bimbingan teknis perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
4. Membangun Kemitraan UMKM dengan Investor dengan melaksanakan Kegiatan temu usaha untuk meningkatkan Kemitraan Usaha UMKM dengan pelaku pasar serta melaksanakan Sosialisasi Kemitraan Usaha UMKM.
5. Menyusun naskah akademis Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di kota Samarinda.
6. Perbaikan proses pelayanan perijinan agar pelayanan perijinan mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan.
7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya dengan melakukan pelatihan penanganan pelayanan perizinan dengan diberlakukannya *Online Singe Submission (OSS)* kepada pegawai dilingkungan DPMPPTSP Kota Samarinda.
8. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya dengan melakukan up grade system aplikasi.
9. Perbaikan sistem pengendalian internal pelayanan perizinan, dengan melakukan penyempurnaan peraturan internal tentang SOP.

Secara keseluruhan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda pada tahun 2021 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada tahun 2021 dan seterusnya akan terus ditingkatkan Kinerja Pelayanannya.

Samarinda , Februari 2022
Kepala Dinas,

Jusmaramdhana Alus., SH., M.Si
NIP. 19711030 199403 1 002



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RINGKASAN EKSEKUTIF | i |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| LAMPIRAN | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1.Latar Belakang | 1 |
| 1. Umum | 1 |
| 2. Maksud dan Tujuan | 2 |
| 3. Ruang Lingkup | 2 |
| 1.2.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3 |
| 1. Tugas Pokok | 4 |
| 2. Fungsi | 4 |
| 3. Tata Organisasi | 4 |
| 4. Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana DPMPTSP | 6 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| 2.1.Visi dan Misi | 7 |
| 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 9 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1.Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Analisis Capaian Kinerja | 12 |
| 1. Capaian Kinerja Organisasi | 12 |
| 2. Analisis Capaian Kinerja | 15 |
| 3.2. Akuntabilita Keuangan | 26 |
| 3.3. Prestasi | 29 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| 4.1. Kesimpulan..... | 30 |
| 4.2.Saran | 31 |
| | |
| <u>LAMPIRAN :</u> | |
| 1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 | |
| 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | |
| 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 | |
| 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 2021 | |
| 5. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 2021 | |
| 6. Rekapitulasi Laporan Bulanan Realisasi Anggaran Belanja Langsung APBD Tahun 2021 | |



DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPSTP 5



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1.1. Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon..... | 6 |
| Tabel 1.2. Jumlah personil Berdasarkan Golongan..... | 6 |
| Tabel 1.3. Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 6 |
| Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 | 8 |
| Tabel 2.2. PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2021 | 9 |
| Tabel 2.3. Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021 | 9 |
| Tabel 2.4. Belanja Pada DPMPTSP Tahun 2021 | 9 |
| Tabel 2.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | 10 |
| Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan 2021 | 12 |
| Tabel 3.2. Tabel Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Samarinda tahun anggaran 2020-2021 | 13 |
| Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah | 14 |
| Tabel 3.4. indikator kinerja Jumlah nilai investasi | 16 |
| Tabel 3.5. indikator kinerja Terlaksananya Event Promosi Investasi..... | 17 |
| Tabel 3.6. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2021..... | 18 |
| Tabel 3.7 Target dan realisasi pengembangan aplikasi IT DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021..... | 19 |
| Tabel 3.8 indikator kinerja Jumlah Penerbitan Izin yang masih masuk dalam rangka Peningkatan Investasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2021..... | 20 |
| Tabel 3.9 Jumlah Permohonan Izin Yang Terlayani Tahun 2021 | 21 |
| Tabel 3.10 Jumlah Permohonan Non Izin Tahun 2021 | 22 |
| Tabel 3.11 indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Tahun 2021 | 23 |
| Tabel 3.12. Nilai Rata-rata (NRR) Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Berdasarkan 9 (sembilan) Unsur Pelayanan | 24 |
| Tabel 3.13 Indikator kinerja penyusunan dokumen SAKIP DPMPTSP | 25 |
| Tabel 3.14 Program dan Kegiatan (Pagu APBDP) TAHUN 2021 | 26 |



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1. UMUM

Pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah selalu berbasis pada prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol. Pencapaian optimal kegiatan merupakan cerminan keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga dapat mendukung keberhasilan Pemerintah Kota.

Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Daerah di setiap Kota adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal mana dimaksud telah ditetapkan didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda periode 2021-2026 merupakan acuan bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda periode 2021-2026 juga merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara internal baik itu unsur pimpinan maupun staf tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama. Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026 diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPMPTSP Kota Samarinda sebagai penyelenggara pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan serta koordinasi dengan instansi teknis. Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Daerah di setiap Kota adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Dengan Tugas Pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal. Untuk mencapai fungsi maka Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2022-2026 sebagai berikut :

1. Jumlah nilai realisasi investasi;
2. Jumlah Investor;
3. Jumlah nilai rata-rata Indeks Survei Kepuasan Masyarakat;

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini DPMPTSP pada tahun anggaran 2021 mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 21.044.330.215,-** (dua puluh satu milyar empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus lima belas rupiah. Yang terbagi untuk belanja pegawai sebesar **Rp. 12.351.163.000,-** (dua belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah); Belanja Barang



dan Jasa Rp. 6.827.855.215,- (enam milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah) dan untuk belanja modal sebesar Rp. 1.865.312.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus duabelas ribu rupiah). Jumlah program dan kegiatan yang terealisasi dari anggaran tersebut yakni 6 (enam) Program, 12 (duabelas) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Dari segi Penerimaan target retribusi yang ditetapkan sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) pada APBD Tahun 2021. total retribusi yang tercapai pada tahun 2021 sebesar Rp. 8.941.683.261,- (delapan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) masih terdapat kekurangan Rp. 4.558.316.739,- (empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam belas tiga puluh tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari Dari segi penerimaan masih terdapat kekurangan dari yang telah ditargetkan pemerintah kota dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan perizinan pada masyarakat Kota Samarinda Pada tahun 2021 DPMPTSP terus mengoptimalkan inovasi Upaya yang dilakukan DPMPTSP dengan memberikan layanan tanpa tatap muka melalui Aplikasi whatsapp, pendaftaran konsultasi dikomunikasikan melalui WA sedangkan berkas persyaratan dikirimkan ke DPMPTSP atau melalui pendaftaran online di dpmptsp.samarindakota.go.id/portal.html.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran pencapaian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan control dari kegiatan-kegiatan DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021 dan penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima.

Sedangkan tujuannya untuk memperoleh umpan balik dari pengalaman pelaksanaan, pola pikir dan tindakan untuk upaya perbaikan terus menerus yang kesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja investasi penanaman modal, layanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk sesuai dengan per undang-undangan berlaku.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 ini mengenai kegiatan investasi penanaman modal dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kota Samarinda dengan urutan pembahasan adalah :

- a. Pendahuluan
- b. Perencanaan Kinerja
- c. Akuntabilitas Kinerja
- d. Penutup



1.2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda berasal penggabungan 2 (dua) instansi yaitu Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) yang kemudian di merger menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebagai pedoman dalam melaksanakan Kewenangan Daerah, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Tugas Pokok DPMPTSP Kota Samarinda adalah membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal. Kewenangan atas dasar urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal sebagaimana disebutkan diatas, tujuan utamanya adalah peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah dengan sasaran pokok ialah menciptakan bangunan dasar bagi usaha Pelaksanaan Program Dan Rencana Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.

DPMPTSP Kota Samarinda ditetapkan menjadi lembaga difinitif ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 pada Tanggal 16 Agustus 2016 dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3).

Kemudian diterbitkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Tujuan dibentuknya DPMPTSP Kota Samarinda adalah menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan bidang investasi dengan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. percepatan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan. dengan sasaran Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.

DPMPTSP Kota Samarinda pada saat ini berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 1 RT. 34 Gedung MPP Samarinda 75123, Telp. (0541) 739614, Fax (0541) 741286, SMS Center 082152246964 Email : dpmptsp.-smd@gmail.com, Website : dpmptsp.samarindakota.go.id/ [mpp.samarindakota.go.id.](http://mpp.samarindakota.go.id/)



TUGAS POKOK DPMPPTSP Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

1. FUNGSI

DPMPPTSP Kota Samarinda memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas.
2. Perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan Program kerja Tahunan Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana strategis, tujuan dan sasaran serta kerjasama, baik dalam negeri maupun luar negeri Bidang Penanaman Modal.
5. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas tertentu penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
7. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.
8. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada Walikota.
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. TATA ORGANISASI

a. STRUKTUR ORGANISASI

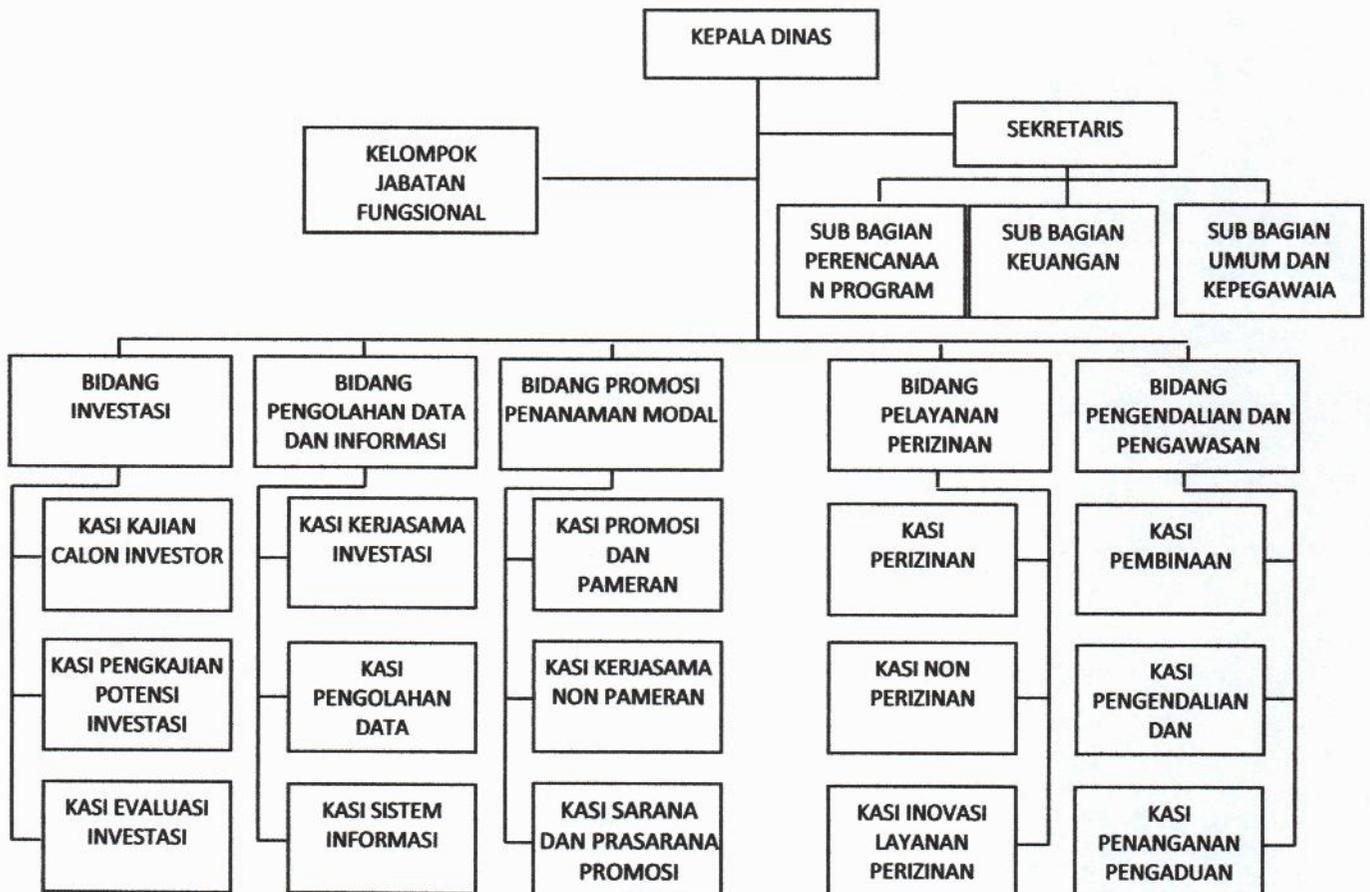
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Investasi, membawahkan :
 - a. Seksi Kajian Calon Investor;
 - b. Seksi Pengkajian Potensi Investasi; dan
 - c. Seksi Evaluasi Investasi.
4. Bidang Pengolahan Data Informasi, membawahkan :
 - a. Seksi Pemberitaan dan Kerjasama Informasi;
 - b. Seksi Pengolahan Data; dan
 - c. Seksi Sistem Informasi.



5. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan :
 - a. Seksi Promosi dan Pameran;
 - b. Seksi Kerjasama Non Pameran; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
6. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan :
 - a. Seksi Perizinan;
 - b. Seksi Non Perizinan; dan
 - c. Seksi Inovasi Layanan Perizinan.
7. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan; dan
 - c. Seksi Penanganan Pengaduan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 1.1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP





3. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sudah didukung oleh aparatur pelayanan perizinan dengan jumlah personil sebanyak 121 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon

| No. | Eselon / Non Eselon | Jabatan | Jumlah |
|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1. | Eselon II b | Kepala Dinas | 1 Orang |
| 2. | Eselon III a | Sekretaris | 1 Orang |
| 3. | Eselon III b | Kepala Bidang | 30 Orang |
| 4. | Eselon IV a | Kasubbag & Kasi | 18 Orang |
| 5. | Non Eselon | Staf | 46 Orang |
| 6. | PTTB | Staf | 29 Orang |
| 7. | PTTH | Staf | 18 Orang |
| Jumlah Keseluruhan | | | 115 Orang |

Tabel 1.2

Jumlah personil Berdasarkan Golongan

| No. | Eselon / Non Eselon | Jumlah |
|---------------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Golongan IV | 6 Orang |
| 2. | Golongan III | 39 Orang |
| 3. | Golongan II | 23 Orang |
| 4. | PTTB | 29 Orang |
| 5. | PTTH | 18 Orang |
| Jumlah Keseluruhan | | 115 Orang |

Tabel 1.3

Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Sarjana (S2) | 15 Orang |
| 2. | Sarjana (S1) | 51 Orang |
| 3. | Diploma (D3/D2) | 5 Orang |
| 4. | SMA/SMK/MAN | 44 Orang |
| Jumlah Keseluruhan | | 115 Orang |

Aparatur pada DPMPTSP Kota Samarinda terdiri dari 68 PNS, sedangkan sisanya sebanyak 47 dari Non PNS merupakan Tenaga Honorer/ PTTB dan PTTH.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamankan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah Terpilih dalam Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 adalah :

“ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN ”

Dalam mencapai Visi ini, ada 6 (enam) Misi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

1. Mewujudkan masyarakat madani (civil society) ditopong dengan sumberdaya manusia unggul, sehat jasmani dan rohani dalam kehidupan yang harmonis, egaliter serta relasi yang seimbang antar tiga pilar (masyarakat, negara dan swasta).
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan PAD, berkurangnya angka pengangguran, berkembangnya sector riil diluar pertambangan, munculnya ekonomi kreatif, start up dan market place di era revolusi industry 4.0.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan.
4. Mewujudkan masyarakat religius, mengedepankan nilai-nilai agama dan memegang teguh tradisi dan adat istiadat sebagai warisan leluhur dan identitas bangsa.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, modern, nyaman dan ramah lingkungan dalam konsep SMART CITY yang dicirikan pemanfaatan teknologi informasi.



Adapun yang menjadi fokus DPMPTSP Kota Samarinda adalah misi ke-2 dan misi ke-3. yang menjadi tugas dan tanggungjawab DPMPTSP dalam pencapaian Visi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda periode Tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dikelompokkan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Iklim Investasi di Kota Samarinda;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan. Sedangkan

Sasaran dari Tujuan Jangka Menengah yaitu :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi;
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan;

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda kerjanya disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Target Indikator Kinerja Sasaran | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Meningkatkan Iklim Investasi di Kota Samarinda | Meningkatnya Nilai Investasi | Meningkatnya Nilai Investasi | 950 Milyar (Rp) | 1 Triliun (Rp) | 1,1 Triliun (Rp) | 1,2 Triliun (Rp) | 1,3 Triliun (Rp) | 1,4 Triliun (Rp) |
| 2. | Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan | Nilai Rata-Rata Indeks Survei Kepuasan Masyarakat | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |



2.2. PERJANJIAN KINERJA 2021

Adapun Perjanjian Kinerja yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan dan tercapai optimal pada tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. | Meningkatnya Investasi | Nilasi Investasi | Rp. 950.000.000.000,- |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 92 % |

Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3
ANGGARAN DAN PROGRAM DPMPTSP TAHUN 2021

| No. | Program | Anggaran |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Rp. 350.000.000,00 |
| 2. | Program Promosi Penanaman Modal | Rp. 817.300.000,00 |
| 3. | Program Pelayanan Penanaman Modal | Rp. 449.860.000,00 |
| 4. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp. 322.290.000,00 |
| 5. | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Rp. 480.175.000,00 |
| 6. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 4.867.418.865,00 |

2.3. PERENCANAAN KEUANGAN

Dalam satu tahun anggaran, seluruh Perangkat Daerah diberikan kesempatan untuk merencanakan pagu anggaran yang sudah ditetapkan melalui anggaran perubahan. Berikut uraian anggaran perubahan berdasarkan DPA DPMPTSP Tahun 2021 yang tertuang dalam program dan kegiatan sebagaimana terurai dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Belanja Pada DPMPTSP (Pagu APBDP)
TAHUN 201

| NO | URAIAN | PAGU (Rp) |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|
| I | Belanja Operasi. | |
| | 1. Belanja Pegawai | 12.351.163.000,- |
| | 2. Belanja Barang dan Jasa. | 6.827.855.215,- |
| 2 | Belanja Modal | |
| | 3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin. | 1.865.312.000,- |
| | TOTAL | 21.044.330.215,- |



Tabel 2.5
PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN (Pagu APBDP)
TAHUN 2021

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | PAGU (Rp) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. | |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100.000.000,- |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12.037.563.000,- 1.768.965.000,- |
| 3 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 39.084.250,- 59.978.000,- 189.997.525,- 293.324.400,- 199.908.000,- |
| 4 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 997.150.000,- 200.000.000,- |
| 5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlegkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.035.600.000,- 30.000.000,- 180.000.000,- |
| 6 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 261.859.040,- 1.036.545.000,- 22.160.000,- |



| | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| II | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | |
| 7 | Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000,- |
| | Sub Kegiatan : 1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 250.000.000,- |
| III | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | |
| 8 | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | 128.280.000,- |
| | 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 650.000.000,- |
| IV | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | |
| 9 | Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 449.860.000,- |
| V | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | |
| 10 | Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal yangn Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 226.836.000,- |
| | 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 267.445.000,- |
| | 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 99.600.000,- |
| VI | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | |
| 11 | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan : 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 480.175.000,- |
| | TOTAL | 21.044.330.215,- |



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Pencapaian kinerja yang dilaksanakan DPMPTSP Kota Samarinda melalui 6 (enam) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran/program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, yaitu :

- 81 - 100 = Baik
- 50 – 80 = Cukup
- Dibawah 50 = Kurang

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang digunakan oleh organisasi untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. DPMPTSP Kota Samarinda menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Samarinda. Dari hasil pengukuran kinerja, sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja persentase yang telah dicapai sebesar 78,16% dan 1 (satu) Indikator Kinerja kedua telah tercapai target 96%. Hasil pengukuran kinerja pencapaian DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Pro-sentase | Tingkat Capaian Sasaran | | |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | B | C | K |
| 1. | Meningkatnya Investasi | nilai investasi | Rp.950.000.000.000,- | Rp. 1.766.235.000.000,- Terdiri dari Nilai Investasi : PMDN :Rp. 585.533.300.000,- PMA :Rp.1.180.701.700.000,- | 78,16 % | | √ | |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 92 % | 88,7 | 96% | √ | | |

Dari hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Tahun 2021, berdasarkan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2021 dimana dilihat dari tabel menunjukkan hasil dengan kategori "BAIK".



Pada tahun 2021, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dari 2 indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja (96%) tercapai dan 1 (satu) Indikator Kinerja tercapai target (78,16 %).

Tabel 3.2
Tabel Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2020 – 2021

| No. | Indikator Kinerja | Capaian | | | |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 2020 | | 2021 | |
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | nilai investasi : - Jumlah nilai investasi | Rp.10.005.000.000.000,- | Rp.930.676.080.000,- | Rp.950.000.000.000,- | Rp.1.766.235.000.000,- |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 91 | 88,20 | 92 | 88,7 |

Pada tahun sebelumnya (2020), capaian kinerja jumlah investasi hanya sebesar 9,30% karena dampak dari pandemi banyak perusahaan tidak beroperasi secara maksimal dan tidak melaporkan kegiatan penanaman modal sehingga berdampak pada nilai realisasi investasi. Serta kurangnya masyarakat yang mengurus perizinan karena masa Pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021 DPMPTSP juga melakukan penyesuaian target realisasi investasi sebesar Rp.950.000.000.000,- dengan capaian nilai realisasi investasi mencapai Rp.1.766.235.000.000,- dan untuk capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah tercapai, capaian pada tahun 2021 ada sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya (2020). Sehingga Dapat disimpulkan bahwa pencapaian tahun 2021 lebih dapat tercapai dibandingkan pencapaian tahun 2020. Pencapaian tersebut terjadi karena adanya penyesuaian target nilai investasi, penambahan sarana dan prasarana pelayanan perizinan, meningkat kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal, serta optimalisasi pelaksanaan pameran untuk menarik minat investor berinvestasi di Kota Samarinda.

Tahun 2021 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Berikut diuraikan secara keseluruhan hasil pengukuran pencapaian Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021.



Tabel 3.3
Tabel perbandingan realisasi kinerja DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021
dengan target jangka menengah

| No. | Indikator Kinerja | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | Pro-sentase |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1. | Event Promosi Investasi | 33 | 19 | 5 event | 4 Event | 70% |
| 2. | Event Seminar, Konferensi, Lokakarya, Temu Usaha | 11 | 4 Event | 5 event | 5 Event | 81% |
| 3. | Jumlah nilai investasi berskala Nasional PMDN | Rp. 7.255.000.000.000,- | Rp. 24.341.685.041.056,- | Rp 650.000.000.000,- | Rp. 585.533.300.000,- | 100% |
| 4. | Jumlah nilai investasi berskala Nasional PMA | Rp. 2.755.000.000.000,- | Rp. 15.052.657.000.000,- | Rp 300.000.000.000,- | Rp. 1.180.701.700.000,- | 100% |
| 5. | Peta Potensi | 10 Peta | <ul style="list-style-type: none"> • 10 peta • 1 Profil investasi | 1 Profil investasi | 1 Profil investasi | 100% |
| 6. | Kajian investasi | 2 dokumen | 1 dokumen potensi unggulan | 1 dokumen naskah akademis | 1 dokumen naskah akademis | 100% |
| 7. | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring, evaluasi Investasi | 3 kegiatan | 8 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% |
| 8. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan | 92 | 89,1 | 92 | 88,7 | 96% |
| 9. | Pemohon izin yang dilayani | 31.619 | 25.058 | 7.500 | 6.006 | 98% |
| 10. | Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 11. | Tersedianya Jaringan dan Sistem Informasi Penanaman Modal di Kota Samarinda | 10 Aplikasi | 24 Aplikasi | 10 Aplikasi | 11 Aplikasi | 100% |
| 12. | Dokumen SAKIP | 42 Dokumen | 39 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 92,86% |
| 13. | Nilai evaluasi AKIP | 80 | 78 | 80 | 78 | 90,96% |



2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Hingga akhir tahun 2021, DPMPTSP Kota Samarinda telah melaksanakan Program/Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya yang telah dituangkan pada perjanjian kinerja tahun 2021 dengan baik. Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Adapun seluruh capai indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

SASTRA I

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) Indikator Kinerja. Indikator Kinerja tersebut sudah mencapai (78,16%)

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1 (satu) “**Meningkatnya Pertumbuhan Investasi**” diukur dengan menggunakan satu Indikator Kinerja yaitu peningkatan Nilai Investasi setiap tahun. Isu isu strategis Penanaman Modal :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing Kota Samarinda
2. Tersedianya rumusan kebijakan penanaman modal yang mendukung iklim investasi Kota Samarinda sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan penanaman modal yang diarahkan pada peningkatan daya saing kota.
3. Meningkatkan citra Kota Samarinda sebagai Kota tujuan penanaman modal yang prospektif dan kondusif dan menjanjikan bagi para investor baik dalam maupun luar negeri.
4. Meningkatkan kerjasama penanaman modal pemerintah dengan UMKM sebagai percepatan investasi di Kota Samarinda.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan pelayanan yang berdampak pada kondusifnya iklim investasi di Kota Samarinda.

Indikator Jumlah nilai investasi.

Pencapaian indikator kinerja ini di ukur dari nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN yang berinvestasi di Kota Samarinda berdasarkan data Ijin Prinsip Penanaman Modal.



Tabel 3.4
indikator kinerja Jumlah nilai investasi

| No. | Indikator Kinerja | 2020 | | |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| | | Target | Realisasi | Pro- sentase |
| 1. | Nilai investasi : - Jumlah nilai investasi | Rp.950.000.000.000,- | Rp 1.766.235.000.000,- | 78,16 % |
| 2. | Dokumen Naskah Akademis | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % |
| Kategori "BAIK" | | | | |

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target diatas sebagai berikut:

Capaian Indikator kinerja jumlah nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp. 1.766.235.000.000,- Tercapai 78,16% dari target yang telah ditetapkan, secara keseluruhan dari 2 indikator kinerja ini capaian telah **BAIK** . pencapaian indikator ini melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.223.633.500,-. Persentase realisasi 89,45%. Penanaman modal dibagi dua yaitu, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja ini adalah :

1. Membuat Peraturan daerah Kota Samarinda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal untuk memberikan kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi bagi peningkatan penanaman modal dan berinvestasi di kota samarinda
2. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah terkait dengan upaya Harmonisasi Investasi Kajian Calon Inestor pada DPMPTSP Kota Samarinda.
3. Pelaksanaan monitoring evaluasi peta potensi penanaman modal investasi kota samarinda.
4. Melakukan kegiatan Konsultasi/Pendampingan kepada Investor untuk melaporkan kegiatan investasi.
5. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Bimbingan teknis perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
6. Penyusunan dokumen-dokumen investasi seperti peta potensi, profil investasi dan potensi unggulan daerah kota Samarinda.

Adapun Masalah/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi investasi pada tahun 2021 yakni :

1. Masih kurangnya perhatian dan tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang menjadi dasar dalam penghitungan realisasi investasi.
2. Situasi dan kondisi pandemi Covid 19 berdampak signifikan bagi beberapa perusahaan yang berinvestasi di Kota Samarinda sehingga perusahaan tersebut menghentikan sementara proses kegiatan berusaha di mana pada akhirnya realisasi investasi tidak terealisasi secara fisik dan banyak LKPM pelaku usaha yang tercatat nihil.



3. Masih banyaknya LKPM yang disampaikan pelaku usaha tidak disampaikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
4. Kurang tegasnya sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM nya secara berkala.

Program kegiatan lain yang mendukung upaya untuk meningkatkan capaian indikator kinerja peningkatan nilai investasi sebagaimana terurai dalam beberapa kegiatan berikut ini :

1. **Kegiatan pameran dan non pameran dalam dan luar kota wilayah kalimantan timur.** Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan kota samarinda sebagai kota tujuan investasi agar nilai investasi di kota samarinda terus meningkat. Berikut laporan kegiatan pelaksanaan pameran yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021 :

Tabel 3.5
indikator kinerja Terlaksananya Event Promosi Investasi.

| NO. | INDIKATOR KINERJA | 2021 | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | % |
| 1. | Terlaksananya Event Promosi Investasi Event Promosi Investas | 5 Event | 4 Event | 80 % |
| 2. | Event Seminar, Konferensi, Lokakarya, Temu Usaha | 5 Event | 5 Event | 100 % |
| | | | | Kategori "BAIK" |

- Analisis pencapaian target dengan terlaksananya kegiatan promosi pameran yang terus dilaksanakan dalam upaya mempromosikan dan memperkenalkan produk unggulan daerah samarinda. Pencapaian indikator ini melalui Program Promosi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 590.097.711,- Persentase realissasi 90.78 %. Realisasi target yang dapat dicapai dari anggaran yang diserap sebanyak 80% dengan mengikuti 4 event di beberapa wilayah dalam dan luar wilayah kalimantan Timur. Pelaksanaan kegiatan pameran yang dapat dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pameran dalam wilayah Kalimantan Timur dan 2 (dua) kegiatan pameran luar wilayah Kalimantan Timur. dalam rangka menampilkan informasi hasil-hasil pembangunan fisik dan non fisik, mempromosikan dan memeperkenalkan produk unggulan daerah dan produk kreatif serta menyebarkan informasi potensi daerah dalam hal investasi, pariwisata dan perdagangan.
- Analisis pencapaian target non pameran dengan anggaran sebesar Rp. 128.280.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 118.564.500,- persentase realisasi 92,43%. Realisasi target telah tercapai dengan maksimal sebanyak 100 %. Kegiatan kerjasama non pameran yang dilaksanakan ini telah berhasil memfasilitasi beberapa pelaku usaha UMKM memasarkan produknya ke pasaran Indogrosir dan Lotte Mart, Food Mart Matahari dan Era Mart Sehingga UMKM dapat mengembangkan usaha



mereka melalui kerjasama ini. Sehingga dapat menjadi motivasi dan informasi peluang-peluang yang bisa digunakan pada masa pandemi ini agar usaha tetap bisa berjalan dan bangkit kembali untuk mendongkrak roda perekonomian khususnya masyarakat Samarinda.

2. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Iklim penanaman modal yang kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha untuk melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal secara berkala terus di upayakan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan laporan realisasi investasi.

Tabel 3.6
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Tahun 2021

| No. | INDIKATOR KINERJA | 2021 | | |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| | | TARGET | REALISASI | % |
| 1 | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi yang Terpantau | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | | Kategori "BAIK" |

Analisis pencapaian target kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan sebesar Rp. 633.881.000,- yang terserap Rp. 449.890.074,- persentase realisasi 70.97 %. dari anggaran yang terserap, realisasi target telah tercapai dengan maksimal sebanyak 100 % dengan melaksanakan Kegiatan-kegiatan pada tahun 2021 antara lain :

- Kegiatan pemantauan di fokuskan untuk pengumpulan, evaluasi dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan Kantor Perwakilan.
- Kegiatan pembinaan dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis LKPM Online, sosialisasi dan bimbingan teknis OSS RBA, sosialisasi kemitraan Usaha dengan melibatkan 311 pelaku usaha.
- Kegiatan pengawasan dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal melalui pelaksanaan sosialisasi kebijakan berusaha.

Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ini antara lain :

1. Secara geografis di Kota Samarinda lokasi perusahaan-perusahaan pelaku penanaman modal dapat ditempuh tanpa harus menginap sehingga besaran anggaran untuk biaya penginapan tidak dapat diserap, padahal alokasi dana untuk biaya penginapan cukup besar.
2. Dalam masa pandemi Covid-19 beberapa perusahaan hanya mau menemui tim survey pananaman modal setelah menunjukkan hasil



negatif swab antigen, sementara dalam anggaran DAK 2021 tidak ada pengalokasian anggaran untuk biaya swab antigen.

3. Kegiatan Pengolahan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.

Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Dimana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis. Pencapaian kinerja pelayanan saat ini sangat bergantung pada penerapan Sistem Aplikasi IT DPMPTSP yang terus dikembangkan sebagaimana terinci pada table di bawah ini :

Tabel. 3.7
Target dan realisasi pengembangan aplikasi IT
DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021

| No. | INDIKATOR KINERJA | 2020 | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| | | TARGET | REALISASI | % |
| 1. | Tersedianya Jaringan dan Sistem Informasi Penanaman Modal di Kota Samarinda | 10 Aplikasi | 11 Aplikasi | 100 % |
| 2. | Pelaksanaan Pengarsipan digital | 5.000 izin | 5.000 izin | 100 % |
| 3. | Pelaksanaan Pemberitaan baik di Media Cetak dan Elektronik | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |
| Kategori "BAIK" | | | | |

Analisis pencapaian target kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 480.175.000,- yang terserap Rp. 444.939.525,- persentase realisasi 92.66 % dari anggaran yang terserap, realisasi target telah tercapai dengan maksimal sebanyak 100 % dengan melaksanakan Kegiatan-kegiatan pada tahun 2021 antara lain :

1. Secara rutin melakukan dilakukan pemeliharaan IT memastikan bahwa semuanya terus berjalan dengan lancar dan efisien untuk mempertahankan sistem dan menjaga sistem, peralatan yang digunakan, aplikasi, jaringan, database, dll. Dalam kondisi baik.
2. Pengembangan aplikasi melalui integrasi Aplikasi Sistem Informasi dan Perizinan Online (SIPO) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dengan Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD). Dengan adanya integrasi, di harapkan pemohon perizinan akan di periksa ketertiban pajak terlebih dahulu, jika terdapat tunggakan atau permasalahan maka proses pendaftaran di DPMPTSP tidak di lanjutkan, Pemohon di harapkan menyelesaikan terlebih dahulu di Bapenda.
3. Melaksanakan pengarsipan digital melalui aplikasi smart card.
4. Data dan informasi perizinan yang tersaji cepat dan akurat selalu di update melalui website (dpmptsp.samarindakota.go.id) dan Media Sosial seperti Facebook (FB: DpmptspSamarinda) dan Instagram (Dpmptsp Kota



Samarinda) agar masyarakat mudah untuk mengakses data dan informasi tentang pelayanan perizinan dan informasi lainnya.

5. Pemberitaan kunjungan Bappeda dan Kejaksaan, Peresmian Pembukaan Tenant Samsat di MPP, Hearing Komisi I, Kunjungan Wakil Gubernur, Kunjungan DPMPSTP Balikpapan, Sosialisasi dan LKPP, dll.

Adapun kendala-kendala dalam penerapan integrasi aplikasi SIPO dan KSWPD ini yakni perubahan regulasi dan proses perizinan yang menggunakan aplikasi pusat seperti aplikasi OSS RBA dan PBG sehingga regulasi proses dan jenis perizinan yang menjadi kewenangan daerah ikut berubah, proses pemahaman dan perubahan regulasi di daerah membutuhkan waktu dan hal ini juga menyebabkan perubahan dalam sistem aplikasi perizinan di daerah yang disesuaikan dengan perizinan yang mengacu pada regulasi yang baru.

4. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.

Jumlah Penerbitan Izin dalam rangka Peningkatan Investasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 yang masih masuk dalam izin pendelegasian PTSP telah dilaksanakan dengan baik. Pencapaian indikator kinerja berdasarkan prosentase dokumen data perizinan yang dapat dilaksanakan adalah 100% dari yang telah ditargetkan.

Tabel 3.8
indikator kinerja Jumlah Penerbitan Izin yang masih masuk dalam izin pendelegasian PTSP dalam rangka Peningkatan Investasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2021

| No. | INDIKATOR KINERJA | 2021 | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|
| | | TARGET | REALISASI | % |
| 1. | Permohon izin yang dilayani berdasarkan pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan | 7.500 | 4.918 | 65,57 % |
| | | Kategori "CUKUP" | | |

Analisis pencapaian target kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 449.860.000,- yang terserap Rp. 408.808.361,- persentase realisasi 90.87 % dari anggaran yang terserap, realisasi target telah tercapai dengan Kategori Cukup 80 %. Rekapitulasi izin terbit pada tahun 2021 yakni :

- Perizinan : 3.476
- Non Perizinan : 364
- OSS : 1.078



DPMPTSP terus mengembangkan inovasi Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO) yang merupakan Layanan Pendaftaran Izin Secara Online Dan Tracking Izin Untuk Melihat Proses Izin yang dapat diakses langsung oleh pemohon melalui website DMPTYSP. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan layanan dan memudahkan pemohon yang akan mengurus perizinan usahanya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan pada tahun 2021 antara lain :

1. Dengan adanya aplikasi SIMBG (Apikasi pengurusan IMB), maka sangat berdampak pada proses Perizinan IMB dimana kewenangan sebelumnya ada di PTSP beralih Ke PUPR.
2. Beralihnya sistem OSS menjadi OSS RBA berdampak juga pada jumlah pemohon yang dilayani dikarenakan pada sistem OSS RBA, PTSP tidak lagi melayani penginputan izin UMKM.
3. Tidak tercapainya target perizinan karen pemohon yang sudah dihubungi seringkali tidak datang untuk melakukan pembayaran retribusi, sehingga menimbulkan piutang.

Rincian permohonan izin terbit yang dapat diproses oleh DPMPTSP pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Jumlah Permohonan Izin yang terlayani Tahun 2021

| No. | NAMA IZIN | Jumlah Izin Terbit | Ket |
|-----|------------------------------|--------------------|-----|
| 1. | Izin Mendirikan Bangunan | 1.090 | |
| 2. | Penerbitan SIPP (Perawat) | 606 | |
| 3. | Izin SIPA | 206 | |
| 4. | Izin OPTIK | 6 | |
| 5. | SIPA Cabut | 64 | |
| 6. | Izin Sosial | 11 | |
| 7. | Izin Pengumpul Uang/Barang | 2 | |
| 8. | Izin Psikolog | 8 | |
| 9. | Izin SIPA Distributor | 20 | |
| 10. | Titik Reklame IMB Konstruksi | 4 | |
| 11. | Izin Reklame tetap | 1 | |
| 12. | Izin PBG | 2 | |
| 13. | Izin Pendidikan (PAUD) | 112 | |
| 14. | Izin Pendidikan (LKP) | 3 | |
| 15. | Izin Pendidikan (PKBM) | 10 | |
| 16. | Izin Pendidikan (SMP) | 2 | |
| 17. | Izin Limbah B3 | 2 | |
| 18. | Izin IPAL | 3 | |
| 19. | Izin Site Plan Perumahan | 9 | |
| 20. | Izin Perparkiran | 2 | |
| 21. | SIUAKB | 1 | |
| 22. | Izin Bidang Kesehatan | 1.313 | |
| | TOTAL | 3.476 | |



Tabel 3.10
Jumlah Permohonan Non Izin Tahun 2021

| NO. | NAMA IZIN / REKOMENDASI | JUMLAH IZIN TERBIT |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 13 |
| 2 | Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) | 24 |
| 3 | Sertifikat Laik Sehat Hotel | 1 |
| 4 | Tanda Daftar Gudang (TDG) | 3 |
| 5 | Tempat Penimbunan BBM | 4 |
| 6 | Sertifikat Laik Sehat Pest Control | 3 |
| 7 | SLH Depot Air Minum | 13 |
| 8 | SLH Industri Rumah Tangga (IRT) | 150 |
| 9 | Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga (PIRT) | 69 |
| 10 | SLH Rumah Makan/Resto | 54 |
| 11 | Sertifikat Laik Sehat Jasa Hotel | 10 |
| 12 | Sertifikat Laik Sehat Jasa Pakai Air/SPA | 2 |
| 13 | Sertifikat Laik Sehat Jasa Boga | 8 |
| 14 | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) | 10 |
| TOTAL | | 364 |



SASTRA II

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) Indikator Kinerja. Indikator Kinerja tersebut sudah mencapai (96,4)

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan berikut ini:

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Tahun 2021.

Pencapaian indikator kinerja ini diukur dari Survey Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan di DPMPTSP yang dilakukan setiap tahunnya.

Tabel 3.11

indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Tahun 2021

| No. | INDIKATOR KINERJA | 2021 | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| | | TARGET | REALISASI | % |
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Tahun 2021 | 92 | 88,7 | 96,4 % |
| | | | | Kategori "BAIK" |

Analisis dan evaluasi terhadap keberhasilan atas pencapaian target ini dilakukan dengan melakukan Penyusunan Laporan SKM dan melakukan perbaikan kinerja pelayanan terutama pada unsur pelayanan dengan nilai terendah. Adapun langkah – langkah penyusunan Laporan SKM pada DPMPTSP Kota Samarinda dengan tahapan sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
2. Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diterima untuk Seluruh layanan Penanaman Modal, Perizinan dan non Perizinan, maupun layanan berbantuan OSS yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dan telah dicapai 357 responden maka dapat dilakukan perhitungan. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata yang diperoleh dari setiap jenis pelayanan yang telah mencapai 357 responden maka diperoleh hasil skor rata-rata Indeks **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM): 88,70**. Dengan mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK,

karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 – 88,30.

3. Untuk nilai rata-rata setiap unsur pelayanan dari seluruh jenis pelayanan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021, dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Nilai Rata-rata (NRR) Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan

| No. | Unsur Pelayanan | RATA-RATA |
|-----|-----------------------------------------|-----------|
| 1. | Persyaratan | 3.591 |
| 2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3.518 |
| 3. | Waktu Penyelesaian | 3.543 |
| 4. | Biaya/Tarif | 3.535 |
| 5. | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.521 |
| 6. | Kompetensi Pelaksana | 3.560 |
| 7. | Perilaku Pelaksana | 3.541 |
| 8. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.541 |
| 9. | Sarana dan Prasarana | 3.613 |

4. Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM 3,250 atau BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan kembali.
5. Dari Tabel dapat dilihat bahwa kesemua unsur pelayanan memiliki Nilai (NRR) yang BAIK dengan nilai (NRR) tertinggi adalah Unsur Sarana Prasarana (NRR 3,613), Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi berdasarkan penilaian responden adalah unsur Sarana Prasarana. Nilai Rata-Rata kesemua unsur lebih dari 3,250, hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda umumnya sudah baik dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
6. Beberapa unsur kualitas pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan yakni :
 - a) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (NRR 3.518)
 - b) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (NRR 3.521)

Berdasarkan hasil Indeks SKM yang telah dilakukan maka dipandang perlu untuk mengadakan beberapa upaya perbaikan kinerja pelayanan Perizinan dan non Perizinan, Penanaman Modal, dan layanan berbantuan OSS khususnya kepada Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, serta Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, karena pada awal hingga akhir



tahun 2021 ini masih terhambat oleh situasi pandemi virus COVID-19 yang membatasi pelayanan tatap muka, dan menggunakan Sistem Online yang membuat masyarakat atau pengguna layanan kebingungan dengan Persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur serta waktu penyelesaian yang disesuaikan dengan situasi yang mendukung protokol kesehatan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan prima dalam rangka mewujudkan DPMPTSP Kota Samarinda sebagai wilayah “birokrat yang bersih dan melayani”.

Dari seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan DPMPTS yang menjadi urusan dan tanggungjawab secara keseluruhan telah dilaksanakan. Penyusunan seluruh capaian kinerja DPMPTSP sebagaimana tergambar dalam table berikut :

Tabel 3.13
Indikator kinerja penyusunan dokumen SAKIP DPMPTSP

| No. | INDIKATOR KINERJA | 2021 | | |
|------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| | | TARGET | REALISASI | % |
| 1. | Dokumen SAKIP | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100 % |
| 2. | Nilai evaluasi AKIP | 80 | 72,77 | 90,96% |
| Kategori “BAIK” | | | | |

Pencapaian target ini dilakukan dengan tersusunnya seluruh dokumen SAKIP yakni Renstra, Renja, PK IKU, Pengukuran kinerja, RKT, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD sehingga tercapainya nilai evaluasi AKIP dengan baik. Perolehan capaian ini juga didukung beberapa kegiatan penilaian dan evaluasi oleh pemerintah daerah pada DPMPTSP yakni panji-panji keberhasilan di bidang pelayanan publik. Penilaian dan evaluasi oleh pemerintah pusat pada DPMPTSP antara lain Wilayah Birokrat Bersih Melayani, Role Model, rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada DPMPTSP tahun 2021.



3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam menyusun rencana dan pelaksanaan anggaran Tahun 2020, DPMPSTP Kota Samarinda telah menggunakan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.14
PROGRAM dan KEGIATAN (Pagu APBDP)
TAHUN 2021

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. | | | |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100.000.000,- | 99.555.000,- | 99,56 % |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| | Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12.037.563.000,- 1.768.965.000,- | 10.081.252.741,- 1.561.291.610,- | 83,75% 88,26% |
| 3 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| | Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 39.084.250,- 59.978.000,- 189.997.525,- 293.324.400,- 199.908.000,- | 38.982.5000,- 57.708.750,- 189.923.650,- 280.502.250,- 191.166.234,- | 99,74 % 96,22 % 99,96 % 95,63 % 95,63 % |
| 4 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 997.150.000,- 200.000.000,- | 986.416.000,- 193.819.000,- | 98,92 % 96,91 % |
| 5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | | | |



| | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | Pemerintah Daerah | | | |
| | Sub Kegiatan : | | | |
| | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.035.600.000,- | 184.392.468,- | 17,81 % |
| | 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlegkapan Kantor | 30.000.000,- | 0 | 0 |
| | 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 180.000.000,- | 178.222.000,- | 99,01 % |
| | 6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | Sub Kegiatan : | | | |
| | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 261.859.040,- | 149.637.875,- | 57,14 % |
| | 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya | 1.036.545.000,- | 1.026.204.000,- | 99,00 % |
| | 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 22.160.000,- | 7.765.000,- | 35,04 % |
| II | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | |
| | 7 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | Sub Kegiatan : | | | |
| | 1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 250.000.000,- | 223.633.500,- | 89,45 % |
| III | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | |
| | 8 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | Sub Kegiatan : | | | |
| | 1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | 128.280.000,- | 118.564.500,- | 92,43 % |
| | 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 650.000.000,- | 590.097.711,- | 90,78 % |
| IV | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | |
| | 9 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | Sub Kegiatan : | | | |
| | 1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem | 449.860.000,- | 408.808.361,- | 90,87 % |



| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | |
| V | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | |
| 10 | Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | Sub Kegiatan : | | | |
| | 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 266.836.000,- | 215.240.574,- | 80,66 % |
| | 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 267.445.000,- | 214.254.000,- | 80,11 % |
| | 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 99.600.000,- | 20.395.500,- | 20,48 % |
| VI | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | |
| 11 | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | Sub Kegiatan : | | | |
| | 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 480.175.000,- | 444.939.525,- | 92,66 % |
| | TOTAL | 21.044.330.215,- | 17.462.772.749,- | 82,98 % |

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini DPMPTSP pada tahun anggaran 2021 pada APBD murni mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 17.287.043.865,-** (tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan pada APBDP dilakukan penyesuaian anggaran sehingga DPMPTSP mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 21.044.330.215,-** (dua puluh satu milyar empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus lima belas rupiah) .

Dari plafon anggaran, terserap sebesar **Rp. 17.462.772.749,-** (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh dua juta ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) atau **82,98 %** dari total anggaran yang dialokasikan. Jumlah program dan kegiatan yang terealisasi dari anggaran tersebut yakni 6 (enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 24 (duapuluh empat) Sub Kegiatan. **Penyerapan anggaran pada tahun 2021 ini sudah sangat baik, karena telah tingginya realisasi fisik sebesar 93,31% daripada realisasi keuangan sebesar 82,98 % dan pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.**



3.3. PRESTASI

Disamping capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah dipaparkan dibelakang, DPMPTSP Kota Samarinda juga telah meraih beberapa penghargaan, diantaranya adalah:

- a. Piagam penghargaan stand indoor terbaik pada pekan raya samarinda.
- b. Piagam penghargaan pameran produk unggulan daerah dan peluang investasi di yogyakarta.
- c. Piagam penghargaan dalam rangka menyelesaikan data dukung laporan keuangan di lingkungan kota samarinda.
- d. Piagam penghargaan pameran berskala nasional parekraf expo di mataram.
- e. Stand terbaik kaltim expo 2020.
- f. Stand terbaik invesda expo yogyakarta 2020.
- g. Penghargaan kepada dinas penanaman modal dan ptsp kota samarinda dalam menyampaikan data dukung laporan keuangan di lingkungan pemkot samarinda.
- h. Piagam penghargaan stand terbaik indoor 1 pada pekan raya samarinda.
- i. Piagam penghargaan yang diberikan kepada dinas penanaman modal dan ptsp kota samarinda sebagai penyelenggaraan pelayanan publik.
- j. Stand terbaik pameran investasi produk unggulan perdagangan dan pariwisata, bandung – jawa barat.
- k. Stand informasi terbaik pada pameran kaltim expo.
- l. Stand terbaik pameran investasi perdagangan dan pariwisata di bali.



BAB IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021 ini disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda terutama untuk Meningkatkan kinerja pemerintah Kota Samarinda. Pencapaian sasaran ini secara keseluruhan dapat tercapai dengan baik seperti tergambar pada table berikut dengan beberapa indikator kinerja seperti berikut :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Pro-sentase | Tingkat Capaian Sasaran | | |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | B | C | K |
| 1. | Meningkatnya Investasi | nilai investasi | Rp.950.000.000.000,- | Rp. 1.766.235.000.000,- Terdiri dari Nilai Investasi : PMDN : Rp. 585.533.300.000,- PMA : Rp. 1.180.701.700.000,- | 78,16 % | | v | |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 92 % | 88,7 | 96% | v | | |

Dari plafon anggaran, terserap sebesar Rp. 17.462.772.749,- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh dua juta ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 82,98 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jumlah program dan kegiatan yang terealisasi dari anggaran tersebut yakni 6 (enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 24 (duapuluh empat) Sub Kegiatan. Penyerapan anggaran pada tahun 2021 ini sudah sangat baik, karena telah tingginya realisasi fisik sebesar 93,31% daripada realisasi keuangan sebesar 82,98 % dan pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk capaian kinerja DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021, secara umum menunjukkan hasil dengan kategori "BAIK". dengan capaian rata-rata dari target indikator kinerja sasaran sebesar 87.08 %.



4.2. SARAN-SARAN

Dari beberapa evaluasi diatas, didapat umpan balik (feedback) proses pembelajaran organisasi yang terus menerus (*building learning organisation*) melalui tim work yang harus diperhatikan dan mendapat dukungan semua pihak. Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

1. Terus mengembangkan prinsip-prinsip perbaikan proses pelayanan publik dengan inovasi rencanakan (*plan*) – kerjakan (*do*) – evaluasi (*chek*) – inovasi perbaikan (*action*), sehingga terbentuknya Mal Pelayanan Publik yang berdaya saing kuat.
2. Bekerja berpedoman kepada peraturan perundang-undangan berlaku. Perbaikan atau review beberapa regulasi perlu dilakukan dalam rangka percepatan perizinan dan non perizinan, sehingga OSS dapat berjalan dengan lancar yang memberikan kemudahan pada pelaku usaha.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
4. Penyediaan sarana dan prasarana mendukung IT perizinan sesuai dengan perkembangan teknologi. Mengingat dukungan teknologi informasi sangatlah penting untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu yang memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan tingkat kecermatan yang memadai.
5. Peningkatan fasilitas yang menunjang pelayanan dengan terus melakukan program kerja yang berpihak kepada masyarakat.
6. Melakukan kegiatan promosi melalui kegiatan-kegiatan pameran baik didalam kota maupun luar kota yang bisa meningkatkan nilai investasi.
7. Perbaikan sistem pengendalian internal. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian;
8. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya instansi yang berorientasi kepada hasil serta instansi yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
9. Selalu memotivasi dan mengevaluasi kinerja seluruh pegawai/bidang untuk melaksanakan program kerja yang dimulai dengan perencanaan yang matang, agar hasilnya dapat lebih maksimal dan bermanfaat oleh masyarakat.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIKS PERENCANAAN STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN : 2021 - 2026

| NO | VISI | MISI | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (4) | (5) | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN | 1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan PAD, berkurangnya angka pengangguran, berkembangnya sector riil diluar pertambangan, munculnya ekonomi kreatif, start up dan market place di era revolusi industry 4.0. | 1. Meningkatkan Jumlah dan Nilai Investasi | 1. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi | Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan dapat menarik minat investor | Memberikan kemudahan bidang Penanaman Modal dan Percepatan Berusaha; | PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL | Nilai Investasi | | | | | |
| | | | | | | | | Nilai Pertumbuhan Investasi | | | | | |
| | | | | | | | | Nilai Realisasi Investasi (Rp) | | | | | |
| | | | | | | | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah perda | | |
| | | | | | | | | - Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | Jumlah perda | | | |
| | | | | | | | | - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | Jumlah Perusahaan yang dievaluasi | | | |
| | | | | | | | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota | | Jumlah dokumen | | | |
| | | | | | | | | - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah dokumen | | | |
| | | | | | | | | - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | | Jumlah dokumen | | | |
| | | | | | | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor | | | | |
| | | | | | | | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Promosi yang diselenggarakan | | | |
| | | | | | | | | - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | | Jumlah dokumen | | | |
| | - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Kegiatan Promosi Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Izin Terbit yang Efektif | | | | | | | | | | | |
| | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Izin Terbit | | | | | | | | | | |

| NO | VISI | MISI | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (4) | (5) | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Masyarakat / Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah ketetapan |
| | | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN | Jumlah LKPM yang Masuk | | | |
| | | | | | | | | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah | | Jumlah Laporan Pengendalian |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perusahaan Jumlah Perusahaan Jumlah Perusahaan |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Jumlah Pengguna Layanan Data | | | |
| | | | | | | | | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah sistem Aplikasi |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Database yang diarsipkan |
| | | 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan | 2. Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat | 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan NonM Perizinan yang Profesional. | Memberikan Kepastian Hukum dan kemudahan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | | | |
| | | | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai IKM | | | |
| | | | | | | | | | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | | Nilai AKIP |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen Perencanaan Jumlah dokumen RKA-SKPD |

| NO | VISI | MISI | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN |
|----|------|------|--------|---------|----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (4) | (5) | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen LAKIP Jumlah laporan evaluasi |
| | | | | | | | | | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | Jumlah Laporan |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | <ul style="list-style-type: none"> Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan Non ASN yang di bayarkan Jumlah Laporan | |
| | | | | | | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Jumlah Laporan Jumlah Laporan | |
| | | | | | | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi - Pengolahan Data Retribusi Daerah - Penetapan Wajib Retribusi Daerah - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah Laporan | |
| | | | | | | | | | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | | Jumlah Pegawai |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai - Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Sarana dan Prasarana Jumlah Pakalan Dinas dan Kelengkapannya Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah Pegawai yang dikutsertakan bimtek/pelatihan Jumlah Pegawai yang dikutsertakan bimtek | |

| NO | VISI | MISI | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN |
|----|------|------|--------|---------|----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (4) | (5) | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Jumlah Laporan | |
| | | | | | | | | | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan | |
| | | | | | | | | | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | |
| | | | | | | | | | - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | |
| | | | | | | | | | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik | |
| | | | | | | | | | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan | |
| | | | | | | | | | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | | | | | - Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bahan material yang disediakan | |
| | | | | | | | | | - Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Rombongan Tamu Yang Berkunjung | |
| | | | | | | | | | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah SPPD | |
| | | | | | | | | | - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah arsip dinamis | |
| | | | | | | | | | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Laporan Rencana Kebutuhan Barang | |
| | | | | | | | | | - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan | |
| | | | | | | | | | - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | | | | | - Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel | |
| | | | | | | | | | - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin | |
| | | | | | | | | | - Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset tetap Berwujud | |
| | | | | | | | | | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung | |
| | | | | | | | | | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung | |
| | | | | | | | | | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Laporan Penyediaan Jasa | |
| | | | | | | | | | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan Rekening yang di bayarkan | |
| | | | | | | | | | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | | | | | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tagihan Jasa Pelayanan Umum | |

| NO | VISI | MISI | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN |
|----|------|------|--------|---------|----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (4) | (5) | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Laporan Pemeliharaan | |
| | | | | | | | | | | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas |
| | | | | | | | | | | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional |
| | | | | | | | | | | - Pemeliharaan Mebel | Jumlah Pemeliharaan Mebel |
| | | | | | | | | | | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan peralatan dan Mesin |
| | | | | | | | | | | - Pemeliharaan Aset tetap lainnya | Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya |
| | | | | | | | | | | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Milik Sendiri/Sewa yang terpelihara |
| | | | | | | | | | | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara |
| | | | | | | | | | | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung yang terpelihara |



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. H. ANDI HARUN, ST, SH, M.Si

Jabatan : Walikota Samarinda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Samarinda, 22 Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(DR. H. ANDI HARUN, ST, SH, M.Si)

JUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si
NIP. 19711030 199403 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Meningkatnya Nilai Investasi | Nilai Investasi | Rp.950.000.000.000,- |
| 2. | Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinandan Non Perizinan | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Capaian Nilai Zona Integritas pada DPMPTSP | 92 % WBBM |

| Program | Anggaran |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Rp. 350.000.000,00 |
| 2. Program Promosi Penanaman Modal | Rp. 817.300.000,00 |
| 3. Program Pelayanan Penanaman Modal | Rp. 449.860.000,00 |
| 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp. 322.290.000,00 |
| 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Rp. 480.175.000,00 |
| 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 14.867.418.865,00 |

Kota Samarinda, 22 Februari 2021

WALIKOTA SAMARINDA

(DR. H. ANDI HARUN, ST, SH, M.Si)

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si
NIP. 19711030 199403 1 002

| 1 | SASARAN | Indikator Sasaran | | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | KET |
|---|---------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|-----|
| | | URAIAN | SATUAN | TARGET | | | URAIAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | | | | 4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Input Dana Output : Jumlah perusahaan/pelaku usaha yang dipantau Outcome : Nilai Investasi | Rp | 266.836.000 | | |
| | | | | | | 6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Input : Dana Output : Peserta pelatihan teknis penanaman modal dan perijinan Outcome : Nilai Investasi | Rp. | 267.445.000 | | |
| | | | | | | 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Input Dana Output : Jumlah perusahaan/pelaku usaha yang dipantau Outcome : Nilai Investasi | Rp | 99.600.000 | | |
| | | | | 5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 5. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 8. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Input : Dana Output : Jumlah Sistem Aplikasi Outcome : Jumlah Pengguna Layanan Data | Rp. | 480.175.000 | | |

| 1 | SASARAN | Indikator Sasaran | | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | KET |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| | | URAIAN | SATUAN | TARGET | | | URAIAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 2. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 2. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | nilai | 89 | 6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 6. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Input : Dana Output : Nilai AKIP Outcome : Nilai AKIP | Rp. Nilai Nilai | 100.000 80 80 | |
| | | | | | | 7. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | 10 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Input : Dana Output : Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan Outcome : Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. Orang persentase | 12.037.563.000 73 100 | |
| | | | | | | | 11 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Input : Dana Output : Gaji dan Tunjangan Non ASN yang di bayarkan Outcome : pembayaran Gaji dan Tunjangan Non ASN | Rp. Orang persentase | 1.768.965.000 43 100 | |
| | | | | | | 8. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | Input : Dana Output : jenis komponen intalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan Outcome : Prosentase jenis komponen intalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan | Rp. Jenis % | 39.084.250 2 100 | |

| 1 | SASARAN | Indikator Sasaran | | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | KET |
|---|---------|-------------------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|-----|
| | | URAIAN | SATUAN | TARGET | | | URAIAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | |
| | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Input : Dana Output : Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Outcome : persentase Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Rp. | 59.987.000 | | |
| | | | | | | 14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Input : Dana Output : jumlah bahan logistik Outcome : Prosentase penyediaan bahan logistik | Rp. | 189.997.525 | | |
| | | | | | | 15 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Input : Dana Output : laporan anggaran yang dicetak atau digandakan Outcome : persentase laporan anggaran yang dicetak atau digandakan | Rp. | 293.324.400 | | |
| | | | | | | 16 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Input : Dana Output : Jumlah SPPD Outcome : Persentase penyusunan SPPD | Rp. | 199.908.000 | | |

| SASARAN | Indikator Sasaran | | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | KET |
|---------|-------------------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----|
| | URAIAN | SATUAN | TARGET | | | URAIAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | 9. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 17 Pengadaan Mebel | Input Dana Output : Jumlah mebel Outcome : persentase penyediaan mebel | Rp. Unit % | 997.150.000 6 100 | |
| | | | | | | 18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Input Dana Output : Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Outcome : Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung | Rp. Jenis % | 200.000.000 2 100 | |
| | | | | | 10. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 19 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Input Dana Output : Taghihan rekening yang dibayarkan Outcome : Pembayaran tagihan rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp. bukti % | 1.035.600.000 36 100 | |
| | | | | | | 20 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Input Dana Output : Jumlah Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome : Pembayaran Tagihan Jasa Taman | Rp. Dokumen % | 30.000.000 1 100 | |

| 1 | SASARAN | Indikator Sasaran | | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | KET |
|---|---------|-------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|-----|
| | | URAIAN | SATUAN | TARGET | | | URAIAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | |
| | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | 21 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Input Dana Output : Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum Outcome : Pembayaran Jasa Kebersihan Gedung | Rp. | 180.000.000 | | |
| | | | | | 11. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan | Input Dana Output : Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Outcome : Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas | Rp. | 261.859.040 | | |
| | | | | | | 23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Input Dana Output : Jumlah Gedung Milik Sendiri/Sewa yang terpelihara Outcome : persentase Jumlah Gedung Milik Sendiri/Sewa yang terpelihara | Rp. | 1.036.545.000 | | |
| | | | | | | 24 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Input Dana Output : Jumlah Sarana dan Pra sarana yang terpelihara Outcome : Persentase pemeliharaan Sarana dan Pra sarana | Rp. | 22.160.000 | | |

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

LAMPIRAN II

TAHUN : 2021

INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

| 1 | 2 | Indikator Sasaran | | | 6 | 7 | SUB KEGIATAN | | | | 12 | 13 | 14 |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|----|
| | | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| SASARAN | URAIAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | URAIAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | REALISASI | PERSENTASE | KET | |
| 1. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi | 1. Nilai Pertumbuhan Investasi | milyar (Rp) | 950 | 1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman | Input : Dana | Rp. | 250.000.000 | 223.633.500 | 89,45 | | |
| | | | | | | | Output : Dokumen naskah akademis | dokumen | 1 | | | | |
| | | | | | | | Outcome : Nilai Investasi | milyar (Rp) | 950 | | | | |
| | | | | | | 2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Input Dana | Rp. | 128.280.000 | 118.564.500 | 92,43 | | |
| | | | | | | | Output : Dokumen Draf Strategi Promosi Event Temu Usaha Promosi Investasi | Dokumen Event | 1 4 | | | | |
| | Outcome : Nilai Investasi | milyar (Rp) | 950 | | | | | | | | | | |
| | | | | 3. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Input Dana | Rp. | 620.750.000 | 590.097.711 | 95,06 | | | | |
| | | | | | Output : Event Promosi Investasi | Event | 4 | | | | | | |
| | | | | | Outcome : Nilai Investasi | milyar (Rp) | 950 | | | | | | |
| | | | | 3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 3. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 4. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Input Dana | Rp. | 449.860.000 | 408.808.361 | 90,87 | | |
| | | | | | | Output : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 90 | | | | | |
| | | | | | | Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat | | 89 | | | | | |
| | | | | 4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman | Input Dana | Rp | 266.836.000 | 215.240.574 | 80,66 | | |
| | | | | | | Output : Jumlah perusahaan/pelaku usaha yang dipantau | perusahaan | 50 | | | | | |

| 1 | 2 | Indikator Sasaran | | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | 13 | 14 |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------|----------------|----------------|-------|
| | | URAIAN | SATUAN | TARGET | | | URAIAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | Outcome : Nilai Investasi | milyar (Rp) | | 950 | | |
| | | | | | | 6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman | Input : Dana | Dana | Rp. | | 267.445.000 | 214.254.000 | 80,11 |
| | | | | | | | Output : Peserta pelatihan teknis penanaman modal dan perijinan | Orang | | | 20 | | |
| | | | | | | | Outcome : Nilai Investasi | milyar (Rp) | | | 950 | | |
| | | | | | | 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Input Dana | Dana | Rp | | 99.600.000 | 20.395.500 | 20,48 |
| | | | | | | | Output : Jumlah perusahaan/pelaku usaha yang dipantau | perusahaan | | | 50 | | |
| | | | | | | | Outcome : Nilai Investasi | milyar (Rp) | | | 950 | | |
| | | | | 5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 5. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 8. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Input : Dana | Dana | Rp. | | 480.175.000 | 444.939.525 | 92,66 |
| | | | | | | | Output : Jumlah Sistem Aplikasi | Aplikasi | | | 1 | | |
| | | | | | | | Outcome : Jumlah Pengguna Layanan Data | Pengguna | | | 350 | | |
| 2. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 2. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | nilai | 89 | 6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 6. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | Input : Dana | Rp. | | 100.000.000 | 99.555.000 | 99,56 |
| | | | | | | | Output : Nilai AKIP | Nilai | | | 80 | | |
| | | | | | | | Outcome : Nilai AKIP | Nilai | | | 80 | | |
| | | | | | 7. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | 10. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Input : Dana | Dana | Rp. | | 12.037.563.000 | 10.081.252.741 | 83,75 |
| | | | | | | | Output : Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan | Orang | | | 73 | | |
| | | | | | | | Outcome : Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | persentase | | | 100 | | |

| SASARAN | Indikator Sasaran | | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | PERSENTASE | KET | |
|---------|-------------------|--------|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----|----|
| | URAIAN | SATUAN | TARGET | | | URAIAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | 11. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Input : Dana Output : Gaji dan Tunjangan Non ASN yang di bayarkan Outcome : pembayaran Gaji dan Tunjangan Non ASN | Rp. Orang persentase | 1.768.965.000 43 100 | 1.561.291.610 | 88,26 | | |
| | | | | 8. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Input : Dana Output : jenis komponen intalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan Outcome : Prosentase jenis komponen intalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan | Rp. Jenis % | 39.084.250 2 100 | 38.982.500 | 99,74 | | | |
| | | | | | 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Input : Dana Output : Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Outcome : persentase Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Rp. Jenis % | 59.987.000 2 100 | 57.708.750 | 96,20 | | | |
| | | | | | 14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Input : Dana Output : jumlah bahan logistik Outcome : Prosentase penyediaan bahan logistik | Rp. jenis % | 189.997.525 5 100 | 189.923.650 | 99,96 | | | |
| | | | | | 15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Input : Dana Output : laporan anggaran yang dicetak atau digandakan | Rp. dokumen | 293.324.400 2 | 280.502.250 | 95,63 | | | |

| 1 | 2 | Indikator Sasaran | | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | 14 |
|---|---|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | | URAIAN | SATUAN | TARGET | | | URAIAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | REALISASI | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | | | | | | Outcome : persentase laporan anggaran yang dicetak atau digandakan | % | 100 | | | |
| | | | | | | 16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Input Dana | Rp. | 199.908.000 | 191.166.234 | 95,63 | |
| | | | | | | | Output : Jumlah SPPD | SPPD | 15 | | | |
| | | | | | | | Outcome : Persentase penyusunan SPPD | % | 100,00 | | | |
| | | | | 9. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 17. Pengadaan Mebel | Input Dana | Rp. | 997.150.000 | 986.416.000 | 98,92 | | |
| | | | | | | Output : Jumlah mebel | Unit | 6 | | | | |
| | | | | | | Outcome : persentase penyediaan mebel | % | 100 | | | | |
| | | | | | 18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Input Dana | Rp. | 200.000.000 | 193.819.000 | 96,91 | | |
| | | | | | | Output : Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung | Jenis | 2 | | | | |
| | | | | | | Outcome : Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung | % | 100 | | | | |
| | | | | 10. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Input Dana | Rp. | 1.035.600.000 | 184.392.468 | 17,81 | | |
| | | | | | | Output : Tagihan rekening yang dibayarkan | bukti | 36 | | | | |
| | | | | | | Outcome : Pembayaran tagihan rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | % | 100 | | | | |
| | | | | | 20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Input Dana | Rp. | 30.000.000 | 0 | 0,00 | | |

| 1 | 2 | Indikator Sasaran | | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | 12 | PERSENTASE | KET |
|---|---|-------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------|------------|-----|
| | | URAIAN | SATUAN | TARGET | | | URAIAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | | | | | | Output : Jumlah Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dokumen | 1 | | | | |
| | | | | | | | Outcome : Pembayaran Tagihan Jasa Taman | % | 100 | | | | |
| | | | | | | 21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Input Dana | Rp. | 180.000.000 | 178.222.000 | 99,01 | | |
| | | | | | | | Output : Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum | | | | | | |
| | | | | | | | Outcome : Pembayaran jasa Kebersihan Gedung | % | 100 | | | | |
| | | | | | 11. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan | Input Dana | Rp. | 261.859.040 | 149.637.875 | 57,14 | | |
| | | | | | | | Output : Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas | unit | 8 | | | | |
| | | | | | | | Outcome : Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas | % | 100 | | | | |
| | | | | | | 23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Input Dana | Rp. | 1.036.545.000 | 1.026.204.000 | 99,00 | | |
| | | | | | | | Output : Jumlah Gedung Milik Sendiri/Sewa yang terpelihara | Gedung | 1 | | | | |
| | | | | | | | Outcome : persentase Jumlah Gedung Milik Sendiri/Sewa yang terpelihara | % | 100 | | | | |
| | | | | | | 24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Input Dana | Rp. | 22.160.000 | 7.765.000 | 35,04 | | |
| | | | | | | | Output : Jumlah Sarana dan Pra sarana yang terpelihara | jenis | 4,00 | | | | |
| | | | | | | | Outcome : Persentase pemeliharaan Sarana dan Pra sarana | % | 100 | | | | |

FORM EVALUASI
BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA OPD TAHUN 2020
INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
TAHUN : 2021

INSTANSI : DINAS PENANAMAN

| 1 | 2 | 3 | 4 | SUB KEGIATAN | | | | | | 12 | |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------------------------|-------|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| SASARAN | PROGRAM | KEGIATAN | URAIAN | SATUAN | TARGET 2020 | TARGET 2021 | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | PERSENTASE =(10)/(8)*100% | KET | |
| 1 | Meningkatkan Pertumbuhan Investasi | 1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Rp. | - | 250.000.000 | - | 223.633.500 | 89,45 | |
| | | | | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Rp. | 150.000.000 | - | 57.095.100 | - | - | |
| | | | | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Rp. | 200.000.000 | - | 121.011.000 | - | - | |
| | | | | Pengembangan Potensi Unggulan dan Kajian Calon Investor | Rp. | 200.000.000 | - | 126.780.000,00 | - | - | |
| | 2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 2. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Rp. | 150.000.000 | 128.280.000 | 148.283.496 | 118.564.500 | 92,43 | | |
| | | | 3. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 734.000.000 | 620.750.000 | 675.501.037 | 590.097.711 | 95,06 | | |
| | 3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 3. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 4. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Rp. | 700.000.000 | 449.860.000 | 683.649.910 | 408.808.361 | 90,87 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | SUB KEGIATAN | | | | | | 11 | 12 |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| SASARAN | PROGRAM | KEGIATAN | URAIAN | SATUAN | TARGET 2020 | TARGET 2021 | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | PERSENTASE =(10)/(8)*100% | KET | |
| | 4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp | 200.000.000 | 266.836.000 | 199.157.447 | 215.240.574 | 80,66 | | |
| | | | 6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp. | - | 267.445.000 | - | 214.254.000 | 80,11 | | |
| | | | 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp | - | 99.600.000 | - | 20.395.500 | 20,48 | | |
| | 5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 5. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 8. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Rp. | 535.000.000 | 480.175.000 | 530.617.000 | 444.939.525 | 92,66 | | |
| | 6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 6. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | Rp. | 100.000.000 | 100.000.000 | 99.765.500 | 99.555.000 | 99,56 | | |
| | | 7. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | 10 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. | 12.064.875.000 | 12.037.563.000 | 9.773.663.001 | 10.081.252.741 | 83,75 | | |
| | | | 11 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Rp. | 1.192.559.100 | 1.768.965.000 | 1.018.691.882 | 1.561.291.610 | 88,26 | | |
| | | 8. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. | 10.000.000 | 39.084.250 | 9.988.750 | 38.982.500 | 99,74 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | SUB KEGIATAN | | | | | | 12 | |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------------------------|-------|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| SASARAN | PROGRAM | KEGIATAN | URAIAN | SATUAN | TARGET 2020 | TARGET 2021 | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | PERSENTASE =(10)/(8)*100% | KET | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. | 500.000.000 | 59.987.000 | 499.741.000 | 57.708.750 | 96,20 | |
| | | | | 14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp. | 190.000.000 | 189.997.525 | 189.988.200 | 189.923.650 | 99,96 | |
| | | | | 15 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp. | 272.800.000 | 293.324.400 | 257.033.500 | 280.502.250 | 95,63 | |
| | | | | 16 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. | 400.000.000 | 199.908.000 | 397.379.545 | 191.166.234 | 95,63 | |
| | | 9. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | 17 Pengadaan Mebel | Rp. | - | 997.150.000 | - | 986.416.000 | 98,92 | |
| | | | | 18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp. | - | 200.000.000 | - | 193.819.000 | 96,91 | |
| | | 10. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | 19 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp. | 8.400.000 | 1.035.600.000 | 422.460 | 184.392.468 | 17,81 | |
| | | | | 20 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. | - | 30.000.000 | - | 0 | 0,00 | |
| | | | | 21 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp. | - | 180.000.000 | - | 178.222.000 | 99,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | SUB KEGIATAN | | | | | | 12 | |
|---------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| SASARAN | PROGRAM | KEGIATAN | URAIAN | SATUAN | TARGET 2020 | TARGET 2021 | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | PERSENTASE =(10)/(8)* 100% | KET | |
| | | | 11. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp. | 186.231.300 | 261.859.040 | 73.772.388 | 149.637.875 | 57,14 | |
| | | | | 23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp. | 20.000.000 | 1.036.545.000 | 19.998.000 | 1.026.204.000 | 99,00 | |
| | | | | 24 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp. | 12.200.000 | 22.160.000 | 8.815.000 | 7.765.000 | 35,04 | |

RESUME SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Bulan : Desember 2021

Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu (Rp) | | Realisasi | | | Keterangan |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------|--------------|
| | | Sebelum Pergeseran | Setelah Pergeseran | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | (%) | (Rp) | (%) | |
| 2.18.0.00.0.00.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda | 17.287.043.865,00 | 21.044.330.215,00 | 93,31% | 17.462.772.749,00 | 82,98% | Unit |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda | 17.287.043.865,00 | 21.044.330.215,00 | 93,31% | 17.462.772.749,00 | 82,98% | Sub Unit |
| 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | Program |
| 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | Kegiatan |
| 2.18.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100,00% | 99.555.000,00 | 99,56% | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Kegiatan |
| 2.18.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.731.173.000,00 | 12.037.563.000,00 | 100,00% | 10.081.252.741,00 | 83,75% | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.076.790.000,00 | 1.768.965.000,00 | 100,00% | 1.561.291.610,00 | 88,26% | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | Kegiatan |
| 2.18.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Kegiatan |
| 2.18.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.996.000,00 | 39.084.250,00 | 100,00% | 38.982.500,00 | 99,74% | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 59.978.000,00 | 59.978.000,00 | 100,00% | 57.708.750,00 | 96,22% | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 189.997.525,00 | 189.997.525,00 | 100,00% | 189.923.650,00 | 99,96% | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 272.799.400,00 | 293.324.400,00 | 100,00% | 280.502.250,00 | 95,63% | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 199.908.000,00 | 199.908.000,00 | 100,00% | 191.166.234,00 | 95,63% | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | Kegiatan |

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu (Rp) | | Realisasi | | | Keterangan |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|--------|--------------|
| | | Sebelum Pergeseran | Setelah Pergeseran | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | (%) | (Rp) | (%) | |
| 2.18.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 0,00 | 997.150.000,00 | 100,00% | 986.416.000,00 | 98,92% | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 200.000.000,00 | 100,00% | 193.819.000,00 | 96,91% | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Kegiatan |
| 2.18.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 8.400.000,00 | 1.035.600.000,00 | 100,00% | 184.392.468,00 | 17,81% | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 0,00 | 180.000.000,00 | 100,00% | 178.222.000,00 | 99,01% | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Kegiatan |
| 2.18.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 186.210.440,00 | 261.859.040,00 | 100,00% | 149.637.875,00 | 57,14% | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 19.996.500,00 | 1.036.545.000,00 | 100,00% | 1.026.204.000,00 | 99,00% | Sub Kegiatan |
| 2.18.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.170.000,00 | 22.160.000,00 | 100,00% | 7.765.000,00 | 35,04% | Sub Kegiatan |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | | Program |
| 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Kegiatan |
| 2.18.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 350.000.000,00 | 250.000.000,00 | 100,00% | 223.633.500,00 | 89,45% | Sub Kegiatan |
| 2.18.02.2.01.02 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | Sub Kegiatan |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | | Program |
| 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Kegiatan |
| 2.18.03.2.01.01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | 128.280.000,00 | 128.280.000,00 | 100,00% | 118.564.500,00 | 92,43% | Sub Kegiatan |
| 2.18.03.2.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 689.020.000,00 | 650.000.000,00 | 100,00% | 590.097.711,00 | 90,78% | Sub Kegiatan |

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu (Rp) | | Realisasi | | | Keterangan |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------|--------|-----------------|
| | | Sebelum Pergeseran | Setelah Pergeseran | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | (%) | (Rp) | (%) | |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | | Program |
| 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | Kegiatan |
| 2.18.04.2.01.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 449.860.000,00 | 449.860.000,00 | 100,00% | 408.808.361,00 | 90,87% | Sub Kegiatan |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | | Program |
| 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Kegiatan |
| 2.18.05.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 222.290.000,00 | 266.836.000,00 | 100,00% | 215.240.574,00 | 80,66% | Sub Kegiatan |
| 2.18.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 100.000.000,00 | 267.445.000,00 | 100,00% | 214.254.000,00 | 80,11% | Sub Kegiatan |
| 2.18.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 0,00 | 99.600.000,00 | 100,00% | 20.395.500,00 | 20,48% | Sub Kegiatan |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | | Program |
| 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Kegiatan |
| 2.18.06.2.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 480.175.000,00 | 480.175.000,00 | 100,00% | 444.939.525,00 | 92,66% | Sub Kegiatan |

Keterangan:

1. Yang diisi hanya **Realisasi Fisik dan Keuangan (Rp)**
2. Mohon tidak melakukan perubahan pada kolom yang dikunci
3. Silahkan dilakukan penyesuaian jika terdapat data yang belum sesuai.
4. Data yang telah disesuaikan mohon untuk dilaporkan ke Bagian Administrasi Pembangunan Kota Samarinda